

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Azhari, A. Samudra. *Perpajakan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011).
- Chaerudin, et al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Refika Editama, 2008).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Revisi 2011. (Yogyakarta: Andi, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI Press, 1992).
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: UGM Press, 2015).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Sakti, 1991).
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung: Sinar Baru, 1993).
- Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2006).

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Soetrisno, P.H. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1993).
- Subrata. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. (Subang: Permata Press, Terbaru).

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)*.
- Kota Tangerang. *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15)*.
- _____. *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16)*.

- _____. *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3).*
- _____. *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4).*
- _____. *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global (No. Reg. Peraturan Daerah Kota Tangerang, Provinsi Banten: 11,78/2016).*
- _____. *Peraturan Walikota Tangerang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Parkir Kendaraan di Jalan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 43).*
- _____. *Peraturan Walikota Tangerang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 57).*

C. Jurnal dan Artikel

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Manajemen Parkir Di Perkotaan*. (Jakarta: Maret, 2015).

Jimly Asshiddiqie. “Penegakan Hukum”, www.jimly.com, 1 April 2020.

Anonim. “Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah)”, www.tangerangkota.bps.go.id, 28 Oktober 2021.